

UNIT PELAKSANA TEKNIS HUMAS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

KLIPING

Klasifikasi

: Universitas Diponegoro – Narasumber

Tema

: Pasal UU KIP Perlu Direvisi

Surat Kabar / Majalah

: Suara Merdeka

Hari Rabu , Tanggal 24, Bulan Maret , Tahun 2010, Halaman -- Kolom --

Ringkasan :

Berkaitan dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik Dekan FH Undip, DR. Arief Hidayat menyatakan, bahwa UU terbut masih perlu direvisi di beberapa pasal. Hal ini dikatakan pada kegiatan yang diadakan oleh Dishubkominfo Jateng dengan Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jateng.

Catatan :

Pasal UU KIP Perlu Direvisi

SEMARANG- Belum lagi diberlakukan, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah menuai kritik dari praktisi hukum.

Beberapa pasal di antaranya perlu direvisi, salah satunya mengenai mekanisme penyelesaian sengketa informasi. UU itu akan efektif diberlakukan pada 1 Mei 2010.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Dr Arief Hidayat menyatakan, dalam UU tersebut mekanisme penyelesaian sengketa informasi melalui Pengadilan Negeri dan PTUN.

Dijelaskan, penyelesaian sengketa melalui PTUN bagi sengketa yang berkaitan dengan badan publik negara. Bagi badan publik nonnegara, penyelesaiannya melalui pengadilan negeri. "Padahal gugatan sengketa informasi termasuk dalam ranah hukum pidana, sehingga PTUN tidak bisa memutuskan sengketa tersebut," tutur Arief saat menjadi pembicara sarasehan dan sosialisasi implementasi UU KIP terhadap tugas jurnalis, di gedung Dharma Wanita Semarang, Selasa (23/3).

Kegiatan diadakan Dinas Perhubungan, Informasi, dan Komunikasi (Dishubkominfo) Jateng bekerja sama dengan Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah (FWPJT). Pembicara lainnya adalah anggota Komisi Informasi Pusat Amirudin, praktisi pers Sriyanto Saputro, dan mantan ketua tim seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jateng Yuliman Purwanto.

Menurut Arief, sesuai peraturan, sengketa informasi hanya dapat diputuskan oleh pengadilan negeri. Selain itu, alur mediasi antarpihak bersengketa perlu di desain ulang.

Dicontohkannya, gagalnya penyelesaian sengketa informasi yang dimediasi KIP provinsi. Sesuai UU itu, pemohon bisa mengajukan gugatan pidana ke pengadilan.

"Sebaiknya sebelum diajukan ke pengadilan, dimediasi ulang dulu ke KIP pusat. Kalau memang gagal barulah diajukan gugatan ke pengadilan," terangnya. (H23,H37-76)



SARASEHAN UU KIP: Forum Wartawan Pemprov Jateng (FWPJT) menggelar sarasehan dengan tema Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terhadap Tugas-Tugas Jurnalistik, kemarin. (57)